

STRATEGI PENGENDALIAN HARGA PANGAN DI KABUPATEN BOGOR

Disusun Oleh :

NAMA : SALLY WULANDARI
NPM : 2342021061
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Telah diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P.)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2025**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Sally Wulandari
NPM : 2342021061
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Strategi Pengendalian Harga Pangan
di Kabupaten Bogor
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Food Price Strategies In Bogor Regency*

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing

Dr. Edy Sutrisno, SE, M.Si

PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : SALLY WULANDARI
NPM : 2342021061
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH
JUDUL TESIS : STRATEGI PENGENDALIAN HARGA PANGAN
DI KABUPATEN BOGOR

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 23 Juni 2025
Pukul : 16.00 WIB

**TELAH DINYATAKAN LULUS
PENGUJI TESIS :**

Ketua Sidang : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA :
Sekretaris : Dr. Achmad Djatmiko, MA :
Anggota : Dr. Neneng Sri Rahayu, ST, M.Si :
Pembimbing : Dr. Edy Sutrisno, SE, MSi :

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sally Wulandari
NPM : 2342021061
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah

Bersama ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya buat berjudul “Strategi Pengendalian Harga Pangan Di Kabupaten Bogor” adalah benar keasliannya dan merupakan hasil karya saya sendiri serta bukan hasil dari penelitian yang telah diajukan guna memperoleh suatu gelar akademik pada universitas ataupun lembaga yang sederajat. Bilamana pada kemudian hari penulisan tesis ini adalah hasil penjiplakan maupun plagiat atas hasil karya orang lain, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab atas menerima sanksi menurut peraturan serta ketentuan yang berlaku pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 Juni 2025
Pembuat Pernyataan,

Sally Wulandari

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, karena atas Rahmat, karunia, serta hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Strategi Pengendalian Harga Pangan di Kabupaten Bogor” secara tepat waktu, guna melengkapi syarat mencapai gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP.) pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari ketekunan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Dr. Edy Sutrisno, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar, dan penuh dedikasi memberikan arahan serta bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini, selain itu penulis juga bermaksud menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta beserta seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu selama peneliti menjalani perkuliahan hingga selesai di Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Dosen Pembahas pada Seminar Proposal, Ibu Prof DR Nurliah Nurdin, MA Ibu DR Mala Sondang Silitonga, MA dan Bapak Dr. Bambang Giyanto, MPd yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun dalam menyempurnakan proposal tesis,
3. Dosen Penguji Ibu DR Mala Sondang Silitonga, MA, Bapak Dr Ahmad Jatmiko, MA dan Ibu Neneng Sri Rahayu, ST, M.Si yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun untuk menyelesaikan tesis ini;
4. Ibunda yang senantiasa memberikan doa yang tulus, semangat dan kasih sayang kepada penulis;
5. Suami Tersayang, Regi Danuwijaya serta Ananda Wildan Sandya Afnan, Agisa Sabira Tisya dan Alea Salima Dzikra yang telah sabar dan Ikhlas untuk memotivasi peneliti hingga tesis ini dapat diselesaikan;

6. Bapak Dr. Rusliandy, S.STP., M.Si., M.E selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor Tahun 2023 beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan amanah tugas belajar kepada peneliti.
7. Bapak Harry Hazarul Akbar, SH, MH selaku Ketua Tim Non Litigasi Tahun 2023 beserta Bapak Yogi Nugraha Setiawan, SH, MH selaku Kepala Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum 2023 yang telah memberikan izin dalam melaksanakan tugas belajar dalam jabatan;
8. Ir. Emy Sriwahyuni, M.Si selaku Kepala Bagian Perekonomian dan Bapak Wahyu Hendra Guntara, ST, MM yang telah memberikan ijinnya agar peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir.
9. Seluruh pegawai pada bagian akademik, perpustakaan dan pegawai STIA LAN Jakarta yang banyak memberikan bantuan selama masa perkuliahan.
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa tugas belajar Manajemen Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Angkatan 2023 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya “ABiPaDy” untuk kerjasama dan motivasi selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis.
11. Seluruh Informan dan semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pahala atas kebaikannya.

Akhir kata, Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna, maka peneliti mohon maaf atas segala kekurangan. Saran dan kritik yang membangun peneliti harapkan, demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah di Kabupaten Bogor khususnya serta pembangunan nasional secara keseluruhan.

Jakarta, 25 Juni 2025

Peneliti

Sally Wulandari

ABSTRAK

Strategi Pengendalian Harga Pangan Di Kabupaten Bogor

Sally Wulandari, Edy Sutrisno

2342021061@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Fluktuasi harga pangan merupakan tantangan serius dalam mewujudkan stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan, khususnya di daerah dengan pertumbuhan penduduk tinggi seperti Kabupaten Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pengendalian harga pangan yang telah dilaksanakan serta merumuskan strategi alternatif yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengendalian harga pangan yang telah dilakukan melalui pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pelaksanaan operasi pasar, dan Gerakan Pangan Murah belum memberikan dampak optimal. Beberapa kendala utama yang diidentifikasi meliputi alih fungsi lahan yang menyebabkan penurunan produksi lokal, inefisiensi rantai distribusi, minimnya cadangan pangan daerah, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah juga memperparah gejolak harga, terutama pada komoditas strategis seperti beras, cabai, dan bawang merah. Penelitian ini merekomendasikan strategi penguatan produksi lokal, reformasi system distribusi, digitalisasi data dan integrasi komunikasi penguatan kelembagaan dan penegakan hukum, pengembangan infrastruktur logistik, pendekatan kebijakan terintegrasi dan partisipatif. Temuan ini diharapkan menjadi dasar perumusan kebijakan pengendalian harga pangan yang lebih responsif, terintegrasi, dan berkelanjutan di tingkat daerah.

Kata kunci: Harga pangan, inflasi daerah, strategi pengendalian, TPID, distribusi pangan, ketahanan pangan, Kabupaten Bogor.

ABSTRACT

Food Price Control Strategy in Bogor Regency

Sally Wulandari, Edy Sutrisno

wulandari.darmawan@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

Food price fluctuations are a serious challenge in realising economic stability and food security, especially in areas with high population growth such as Bogor Regency. This study aims to evaluate the effectiveness of food price control policies that have been implemented and formulate alternative strategies that are more adaptive and sustainable. The research uses a descriptive qualitative method with a case study approach, through in-depth interview techniques, field observations, and analysis of policy documents. The results show that food price control efforts that have been made through the establishment of the Regional Inflation Control Team (TPID), the implementation of market operations, and the Cheap Food Movement have not had an optimal impact. Some of the main obstacles identified include land conversion leading to a decline in local production, distribution chain inefficiencies, lack of regional food reserves, and weak cross-sector coordination. Dependence on supplies from outside the region has also exacerbated price fluctuations, especially in strategic commodities such as rice, chilli and shallots. This study recommends strategies to strengthen local production, reform the distribution system, data digitisation and communication integration, institutional strengthening and law enforcement, logistics infrastructure development, integrated and participatory policy approaches. The findings are expected to be the basis for formulating more responsive, integrated and sustainable food price control policies at the regional level.

Keywords: *Food prices, regional inflation, control strategy, TPID, food distribution, food security, Bogor District.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	16
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan Penelitian.....	17
E. Manfaat Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Tinjauan Kebijakan	24
1. Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	24
2. Peraturan Presiden Nomor No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	25
3. Peraturan Menteri Perdagangan No. 14 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan di Bidang Stabilisasi Harga dan Distribusi Pangan	26
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022	27
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen	28
C. Tinjauan Teori	30
1. Administrasi Publik.....	30
2. Administrasi Pembangunan Negara.....	34

3.	Pembangunan Ekonomi Daerah	36
4.	Kebijakan Pengendalian Harga Pangan dan Stabilitas Pasokan	37
5.	Teori <i>Demand-Pull</i> dan <i>Cost-Push Inflation</i>	42
6.	Strategi Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K)	44
D.	Kerangka Berpikir	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		49
A.	Metode Penelitian.....	49
B.	Teknik Pengumpulan Data	50
C.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	53
D.	Instrumen Penelitian.....	54
E.	Validasi Penelitian.....	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		60
A.	Gambaran Umum Kabupaten Bogor.....	60
1.	Kondisi Geografis	60
2.	Kondisi Demografi.....	67
3.	Status Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Bahan Pangan	72
4.	Indikator Makro Kabupaten Bogor	77
B.	Efektivitas Strategi Pengendalian Harga Pangan yang Telah Dilakukan oleh Kabupaten Bogor.....	85
1.	<i>Demand-Pull Inflation</i>	86
2.	<i>Cost-Push Inflation</i>	91
3.	Strategi Keterjangkauan Harga (<i>Affordability</i>)	95
4.	Strategi Ketersediaan Pasokan (<i>Supply Availability</i>).....	98
5.	Strategi Kelancaran Distribusi (<i>Smooth Distribution</i>)	101
6.	Strategi Komunikasi Efektif (<i>Effective Communication</i>)	103
7.	Identifikasi Efektivitas Strategi 4K.....	106
C.	Analisis Strategi Pengendalian Harga Pangan di Kabupaten Bogor.....	107
D.	Strategi Pengendalian Harga Pangan di Kabupaten Bogor.....	111
1.	Penguatan Produksi Lokal.....	113
2.	Reformasi Sistem Distribusi	113
3.	Digitalisasi Data dan Integrasi Komunikasi.....	114
4.	Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum	114
5.	Pengembangan Infrastruktur Logistik.....	115
6.	Pendekatan Kebijakan Terintegrasi dan Partisipatif	115
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		119
A.	Simpulan.....	119
B.	Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA		123

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Produksi Komoditas Pangan Kabupaten Bogor Tahun 2019-2022.....	12
Tabel 2.1.	Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 3.1.	Daftar Informan Kunci	51
Tabel 4.1.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Bogor Tahun 2022.....	65
Tabel 4.2.	Status DDDTLH Penyedia Pangan (Tabulasi Setiap Kecamatan)	74
Tabel 4.3.	Indikator Makro Kabupaten Bogor 2022-2024	78
Tabel 4.4.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha.....	80
Tabel 4.5.	Hasil Identifikasi <i>Demand-Pull Inflation</i>	90
Tabel 4.6.	Hasil Identifikasi <i>Cost-Push Inflation</i>	94
Tabel 4.7.	Hasil Identifikasi Efektivitas Strategi 4K.....	107
Tabel 4.8.	Analisis Strategi Pengendalian Harga Pangan di Kabupaten Bogor	110
Tabel 4.9.	Rumusan Strategi Pengendalian Harga Pangan di Kabupaten Bogor	111
Tabel 4.10.	Strategi Pengendalian Harga Pangan Kabupaten Bogor	116

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Indeks Harga Pangan Dunia 2000-2023	2
Gambar 1.2.	Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut Kelompok Komoditas (Rupiah) 2023	4
Gambar 1.3.	Tingkat Inflasi Harga Konsumen Nasional Tahunan 2006-2024	5
Gambar 1.4.	Perkembangan IHK Umum dan IHK Makanan	6
Gambar 1.5.	Luas Lahan Panen Padi Nasional 2018-2023	8
Gambar 1.6.	Harga rata-rata komoditas pangan di Jawa Barat 2022-2024	10
Gambar 1.7.	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Jawa Barat 2018-2020	11
Gambar 1.8.	Luas Panen Tanaman Padi Kabupaten Bogor 2018-2023	11
Gambar 1.9.	Harga rata-rata komoditas pangan di Kabupaten Bogor 2021-2023	12
Gambar 2.1.	Kerangka Berpikir	47
Gambar 4.1.	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bogor	61
Gambar 4.2.	Peta Wilayah Daerah dan Arah Pembagian Wilayah Pengembangan ...	64
Gambar 4.3.	Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Bogor	67
Gambar 4.4.	Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	68
Gambar 4.5.	Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2023	68
Gambar 4.6.	Piramida Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2023	69
Gambar 4.7.	Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2022-2024	70
Gambar 4.8.	Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Bogor	73
Gambar 4.9.	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin antara Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2023 (%)	85

DAFTAR ISTILAH

<i>Affordability</i>	:	Keterjangkauan harga oleh masyarakat terhadap kebutuhan pokok seperti pangan
BI	:	Bank Indonesia, Bank sentral Republik Indonesia yang mengatur kebijakan moneter dan inflasi
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan milik pemerintah daerah yang bergerak di sektor strategis seperti pangan dan pasar
<i>Cost-Push Inflation</i>	:	Inflasi akibat kenaikan biaya produksi, seperti bahan baku dan tenaga kerja
<i>Demand-Pull Inflation</i>	:	Inflasi yang disebabkan oleh peningkatan permintaan agregat
<i>Effective Communication</i>	:	Aspek komunikasi strategis dalam strategi pengendalian harga pangan
FGD	:	<i>Focus Group Discussion</i> , Teknik pengumpulan data kualitatif melalui diskusi kelompok terarah.
HAP	:	Harga Acuan Pembelian, Harga minimum pembelian dari petani sesuai ketentuan pemerintah
HAPK	:	Harga Acuan Penjualan Konsumen, Harga maksimum yang boleh dibebankan ke konsumen
HET	:	Harga Eceran Tertinggi, Harga tertinggi yang diperbolehkan untuk komoditas tertentu oleh pemerintah
IMF	:	<i>International Monetary Fund</i> , Lembaga internasional yang mengawasi sistem moneter global dan memberikan dukungan keuangan
IHK	:	Indeks Harga Konsumen, Indikator statistik yang mengukur perubahan harga barang dan jasa rumah tangga
IPH	:	Indeks Perkembangan Harga, Ukuran fluktuasi harga suatu komoditas dari waktu ke waktu
Koefisien Variasi Harga	:	Ukuran statistik untuk mengetahui tingkat fluktuasi harga komoditas pangan

La Niña	:	Fenomena iklim global yang menyebabkan curah hujan tinggi dan berdampak pada produksi pangan
<i>Library Research</i>	:	Metode penelitian yang berbasis kajian pustaka, artikel, dan laporan terdahulu
PIHPS	:	Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, Lembaga penyedia data dan informasi harga komoditas pangan nasional
Proxy Inflasi	:	Indikator tidak langsung yang digunakan untuk memperkirakan tekanan inflasi
<i>Smooth Distribution</i>	:	Kelancaran rantai distribusi barang yang menjadi pilar strategi pengendalian harga
<i>Social Welfare Theory</i>	:	Teori kesejahteraan sosial oleh Arthur Pigou yang menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk memperbaiki kegagalan pasar
<i>Supply Availability</i>	:	Ketersediaan komoditas pangan yang cukup di pasar untuk memenuhi kebutuhan
TPID	:	Tim Pengendali Inflasi Daerah, Tim lintas instansi di tingkat daerah yang bertugas mengendalikan inflasi dan harga pangan
<i>Trade-Off</i>	:	Konsekuensi timbal balik antara dua pilihan kebijakan, misalnya antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi
Triangulasi Data	:	Teknik validasi data dengan menggabungkan berbagai sumber dan metode
Volatilitas Harga	:	Tingkat ketidakstabilan harga dalam periode waktu tertentu

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

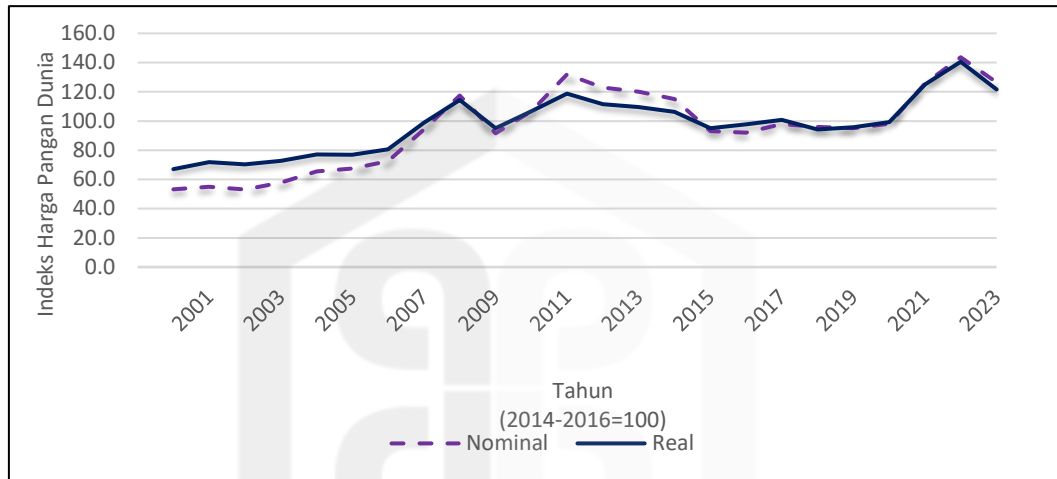
A. Latar Belakang

Selama hampir dua dekade terakhir, dari tahun 2002-2022 harga komoditas pangan di tingkat global mengalami fluktuasi yang semakin tajam. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, ketidakstabilan geopolitik, dan gangguan rantai pasokan telah memperburuk ketidakpastian pasar. Kondisi ini menyebabkan volatilitas harga yang berdampak langsung pada ketahanan pangan, terutama di negara-negara berkembang. Selain itu, perubahan kebijakan perdagangan internasional dan permintaan yang terus meningkat menambah kompleksitas dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan di tingkat global (Li *et al.* 2017; Smales 2017).

Kondisi fluktuasi harga komoditas pangan global ini tentu saja berpotensi menimbulkan tekanan inflasi, yang tidak hanya berdampak secara global, tetapi juga dirasakan di Indonesia. Ketergantungan Indonesia terhadap impor sejumlah komoditas pangan membuat negara ini rentan terhadap kenaikan harga di pasar internasional. Apabila harga pangan melonjak, daya beli masyarakat akan terpengaruh, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang pengeluarannya sebagian besar dialokasikan untuk kebutuhan pangan. Oleh karena itu, pengendalian harga pangan menjadi prioritas penting dalam kebijakan ekonomi pemerintah untuk menghindari dampak inflasi yang lebih luas, termasuk pada sektor lain seperti transportasi dan energi.

Gambar 1 menunjukkan adanya kenaikan indeks harga pangan dunia secara berkelanjutan sejak tahun 2002 sampai 2008, dan adanya ketidakstabilan pasar yang sangat intens sejak tahun 2006. Kenaikan harga makanan yang signifikan terjadi pada tahun 2007-2008, karena harga minyak yang sangat tinggi pada periode ini. Lonjakan harga pangan global kembali terjadi pada tahun 2010-2011, setahun setelah lonjakan global tahun 2007-2008 karena fenomena La Nina yang mengganggu produksi pangan di banyak negara. Harga komoditas pangan kembali

naik di tahun 2016-2017 dan bahkan terjadi lonjakan harga pangan global kembali pada tahun 2020-2022 ketika terjadi pandemi Covid-19.



Sumber: FAO, 2023

Gambar 1.1.
Indeks Harga Pangan Dunia 2000-2023

Salah satu faktor utama yang menyebabkan kenaikan harga pangan adalah inflasi dorongan biaya, atau yang dikenal sebagai *cost-push inflation*. Inflasi ini terjadi ketika biaya produksi meningkat, baik akibat naiknya harga bahan baku, energi, atau upah tenaga kerja, sehingga produsen terpaksa menaikkan harga jual produk mereka. Di sektor pangan, kenaikan harga pupuk, bahan bakar, dan distribusi menjadi pendorong signifikan yang mempengaruhi biaya produksi dan transportasi. Akibatnya, harga pangan di pasar ikut melonjak yang akan membebani konsumen dan memperburuk masalah ketahanan pangan, terutama di negara yang bergantung pada impor bahan pangan.

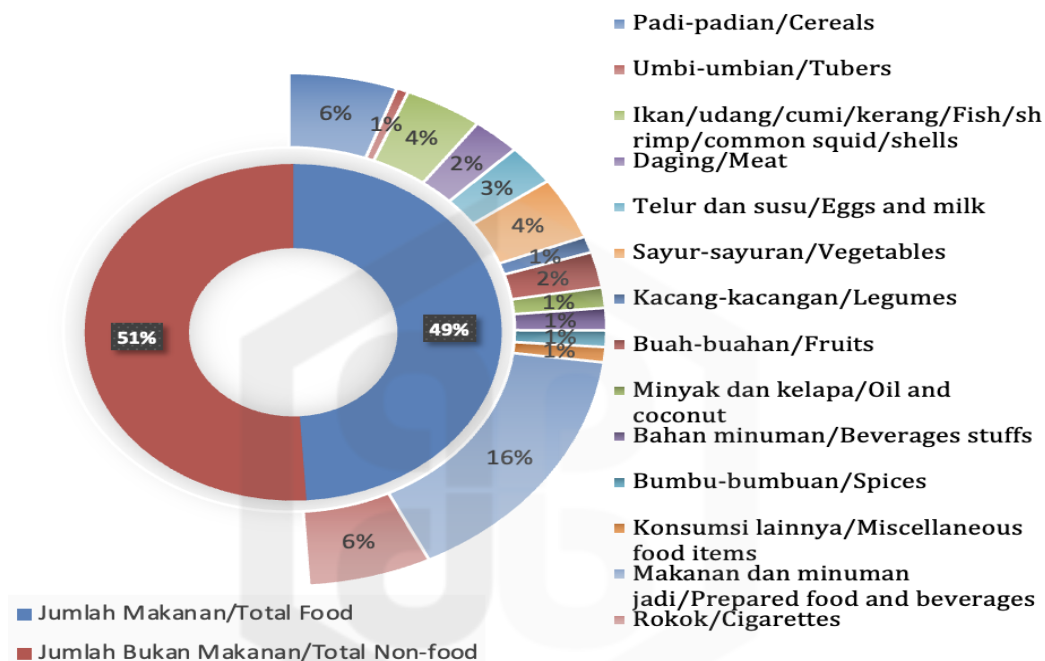
Cost-push inflation terjadi ketika biaya produksi mengalami peningkatan, yang mendorong produsen untuk menaikkan harga produk pangan. Salah satu faktor utama yang dapat memicu kenaikan biaya produksi makanan adalah terbatasnya pasokan hasil pertanian pangan (Kusnadi, 2018). Keterbatasan ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, termasuk bencana alam, gangguan distribusi, serta naiknya biaya input pertanian. Bencana alam seperti kekeringan, banjir, badai, atau

cuaca ekstrem dapat merusak lahan pertanian dan tanaman, yang pada akhirnya mengurangi ketersediaan pangan di pasar dan menyebabkan lonjakan harga.

Gangguan dalam rantai pasokan seperti hambatan transportasi atau distribusi akibat keterbatasan infrastruktur, dapat memperlambat aliran bahan pangan dari produsen ke konsumen, sehingga menimbulkan kelangkaan yang memicu kenaikan harga. Peningkatan biaya energi juga berdampak signifikan pada sektor pertanian, karena naiknya biaya operasional dan transportasi turut memperbesar biaya produksi pangan. Lebih lanjut, kenaikan upah tenaga kerja atau perubahan regulasi ketenagakerjaan dapat menambah beban biaya pada sektor pertanian, yang akhirnya tercermin pada harga jual produk pangan.

Kenaikan harga input pertanian seperti pupuk, pestisida, dan bibit juga berkontribusi terhadap naiknya biaya produksi pangan (Ali, 2020). Ketika biaya produksi ini meningkat, produsen sering kali tidak memiliki pilihan lain selain menaikkan harga jual untuk menutupi kenaikan biaya tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada konsumen melalui lonjakan harga pangan di pasar. Kenaikan harga pangan pokok telah menjadi isu yang semakin mendesak di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup telah mendorong kenaikan permintaan pangan secara signifikan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan, masyarakat semakin banyak mengalokasikan pendapatannya untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Ini terlihat dari proporsi rata-rata pengeluaran per kapita yang dihabiskan untuk komoditas atau bahan pangan.

Menurut data BPS tahun 2023, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok komoditas pangan menunjukkan angka yang cukup tinggi, menegaskan bahwa masyarakat Indonesia mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan pangan. Data ini memperlihatkan bagaimana pangan menjadi prioritas utama dalam struktur pengeluaran rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia. Namun, kenaikan harga pangan pokok tentu akan semakin membebani rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah.



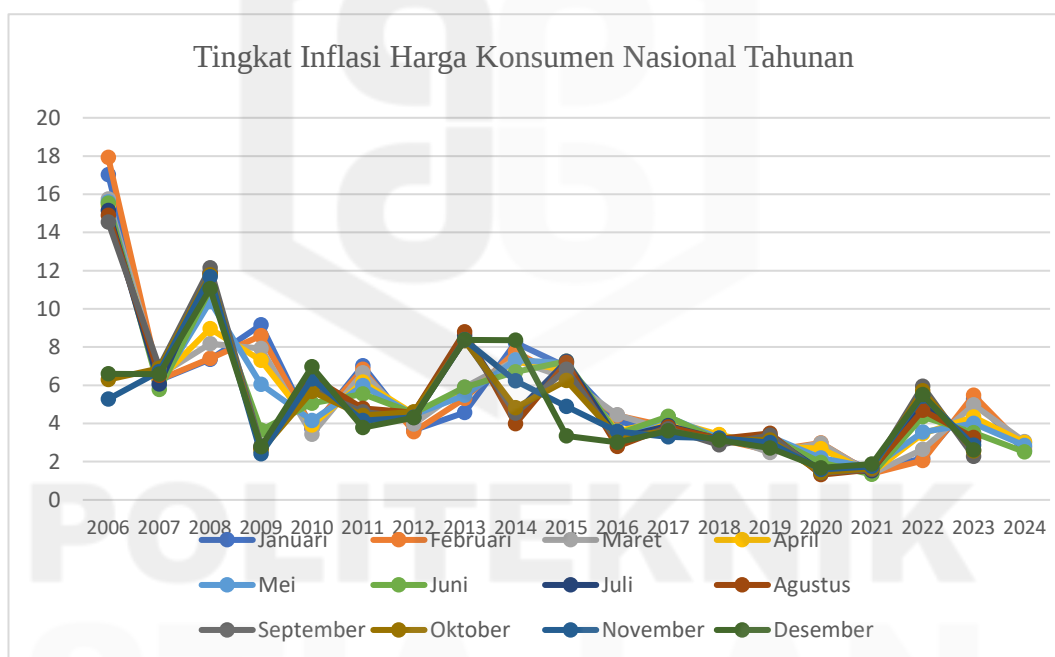
Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah, 2024

Gambar 1.2.
Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut Kelompok Komoditas (Rupiah) 2023

Permasalahan harga pangan yang signifikan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan sistem distribusi pangan yang ada. Salah satu masalah utama dalam pangan adalah fluktuasi harga komoditas. Inflasi yang tinggi pada komoditas pangan tidak hanya disebabkan oleh kekurangan produksi komoditas pangan itu sendiri, tetapi juga oleh berbagai faktor lainnya. Salah satu faktor penting adalah proses distribusi yang kurang efisien, yang dapat menimbulkan disparitas harga yang signifikan antarwilayah dan antarmusim, serta menyebabkan fluktuasi harga yang tidak stabil. Masalah dalam distribusi ini muncul akibat sarana dan prasarana distribusi yang tidak memadai, kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau, pusat produksi yang tidak merata, koordinasi distribusi yang belum optimal, margin distribusi yang tidak proporsional, adanya pungutan liar, serta dominasi pihak-pihak tertentu dalam proses distribusi (Surya, 2015).

Inflasi merupakan salah satu indikator krusial dalam menilai keberhasilan ekonomi suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat

inflasi yang tinggi berpotensi menyebabkan kenaikan harga barang dan penurunan daya beli masyarakat (Sayaka & Adhie, 2016). Tingkat inflasi secara signifikan mempengaruhi pola konsumsi, distribusi, dan produksi dalam perekonomian. Inflasi yang terlalu rendah dapat berdampak negatif dengan melemahkan semangat pelaku usaha, sehingga aktivitas ekonomi menjadi lesu dan pertumbuhan ekonomi terhambat. Kondisi ini, apabila terus berlanjut, berpotensi menyebabkan stagnasi ekonomi (Yurianto, 2020).

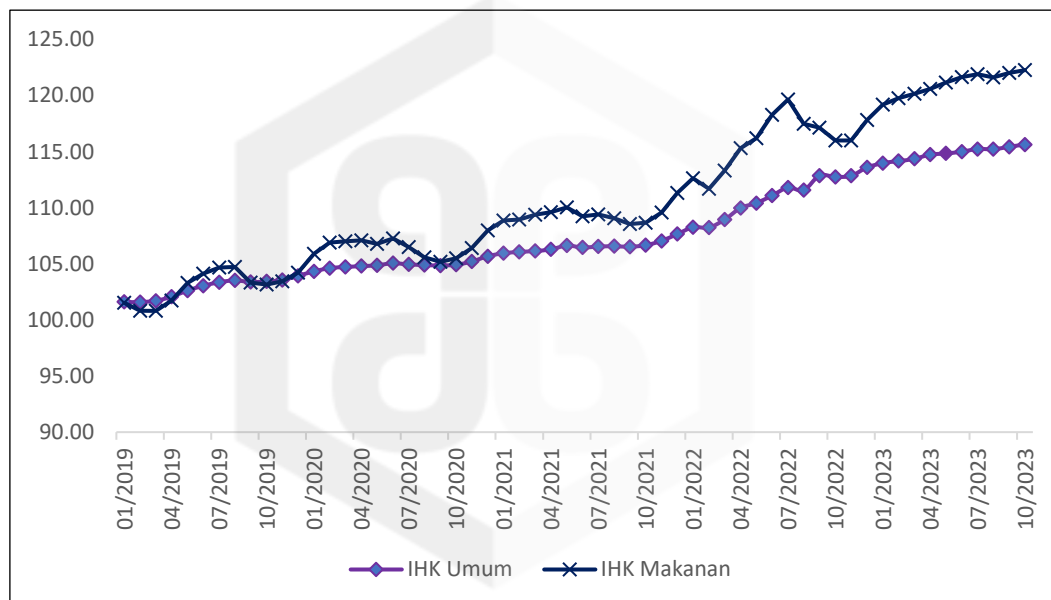


Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah, 2024

Gambar 1.3.
Tingkat Inflasi Harga Konsumen Nasional Tahunan 2006-2024

Selama satu tahun terakhir, laju inflasi harga konsumen di Indonesia mengalami variasi yang cukup mencolok dari bulan ke bulan. Data Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik menggambarkan dinamika perubahan harga barang dan jasa yang memengaruhi inflasi tahunan di Indonesia. Secara umum, lonjakan inflasi cenderung terjadi pada periode-periode tertentu, khususnya menjelang perayaan besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Natal. Pada masa-masa tersebut, lonjakan permintaan masyarakat terhadap

kebutuhan konsumsi, terutama bahan pangan, menjadi faktor utama pendorong kenaikan harga. Selama bulan Ramadhan hingga perayaan Idul Fitri, misalnya, harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula sering mengalami peningkatan yang cukup tajam.



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah, 2023

Gambar 1.4.
Perkembangan IHK Umum dan IHK Makanan

Berdasarkan gambar 4, kurva Indeks Harga Konsumen (IHK) makanan lebih fluktuatif dibandingkan dengan kurva IHK umum dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa permintaan terhadap makanan lebih tinggi daripada non makanan. Jika permintaan makanan meningkat lebih cepat daripada permintaan produk dan layanan secara umum, maka harga makanan dapat mengalami lebih banyak tekanan untuk naik, yang dapat mengakibatkan inflasi makanan yang lebih tinggi daripada inflasi umum. Selain itu, hal ini mengindikasikan bahwa fluktuasi harga makanan memiliki dampak yang lebih besar terhadap inflasi umum, karena sektor makanan memiliki bobot yang lebih besar dalam perhitungan inflasi umum daripada sektor non makanan. Inflasi pangan dapat menjadi faktor penting dalam menentukan perubahan inflasi umum, karena

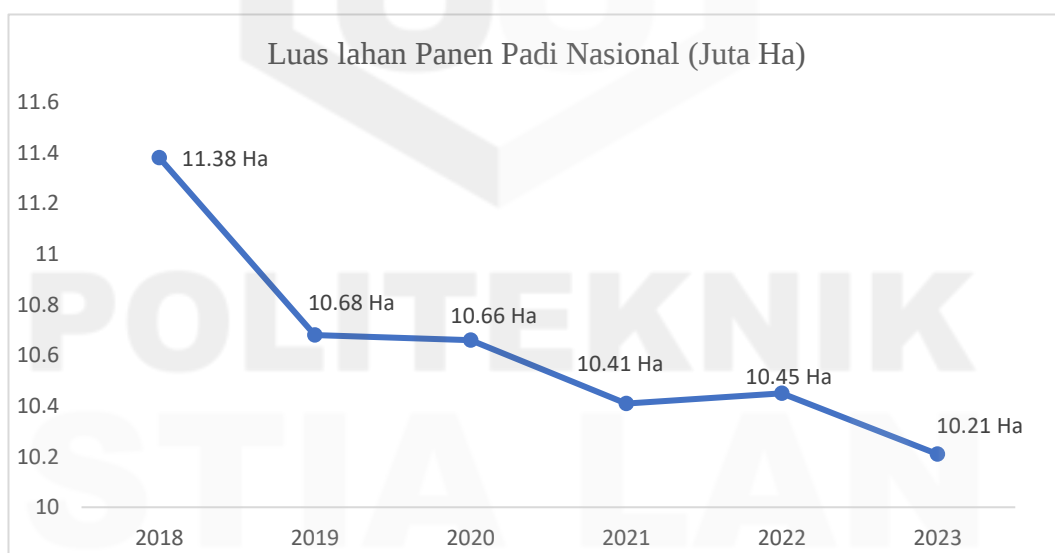
harga makanan yang tinggi atau volatilitas harga yang signifikan dapat memberikan tekanan besar pada tingkat inflasi di Indonesia.

Kenaikan IHK kelompok makanan, minuman, dan tembakau di suatu wilayah bisa mempengaruhi sentimen konsumen secara keseluruhan terhadap harga-harga pangan di wilayah tersebut. Jika IHK makanan, minuman, dan tembakau naik secara signifikan diatas kenaikan rata-rata IHK secara nasional, hal ini bisa menyebabkan kekhawatiran dan ketidakpastian di kalangan konsumen tentang kenaikan harga makanan minuman, dan tembakau, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perilaku belanja mereka. Dengan demikian, mengamati IHK makanan, minuman, dan tembakau regional dapat memberikan gambaran yang cukup baik tentang tren inflasi pangan suatu wilayah (Mhonyera et al. 2023).

Dampak kenaikan harga pangan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi hal yang sangat relevan, terutama terkait dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan (SDG 1), mengakhiri kelaparan (SDG 2), dan mengurangi ketimpangan (SDG 10). Kenaikan harga pangan secara langsung meningkatkan beban hidup masyarakat miskin, yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, mengurangi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini memperburuk kemiskinan dan memperlambat pencapaian SDG 1. Selain itu, tingginya harga pangan membatasi akses masyarakat terhadap pangan yang bergizi, yang berpotensi meningkatkan angka kelaparan dan kekurangan gizi, khususnya di kalangan kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia, yang menghambat pencapaian SDG 2. Kenaikan harga pangan juga berdampak lebih besar pada rumah tangga berpendapatan rendah, memperlebar ketimpangan ekonomi, dan mengganggu upaya menuju masyarakat yang lebih inklusif dan adil, sesuai dengan SDG 10.

Alih fungsi lahan sawah yang secara masif antara tahun 2018 hingga 2023 telah menjadi isu paling mendasar yang mengakibatkan penurunan produksi beras nasional. Meskipun telah ada Undang-Undang No 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), lahan sawah terus mengalami konversi,

terutama disebabkan oleh proyek strategi nasional (PSN), yang banyak berfokus di Pulau Jawa. Penurunan luas lahan panen padi nasional sebesar 11,38 juta Ha pada tahun 2018 menjadi 10,21 Juta Ha di tahun 2023 menyebabkan pada penurunan produksi beras, yang pada gilirannya menyebabkan kenaikan harga beras. Ketika produksi beras menurun akibat berkurangnya lahan pertanian, pasokan beras di pasar menjadi lebih terbatas. Di sisi lain, permintaan beras tetap tinggi atau bahkan meningkat seiring pertumbuhan populasi (Next Policy, 2024). Ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan ini kemudian memicu kenaikan harga beras secara signifikan. Kondisi ini menuntut peran aktif pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekonomi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 1.5.
Luas Lahan Panen Padi Nasional 2018-2023

Peningkatan harga pangan yang cukup tajam mencerminkan adanya gejolak harga yang secara langsung memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketidakstabilan ini umumnya disebabkan oleh ketidakseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan musim, kondisi cuaca ekstrem, bencana alam, serta kendala dalam rantai distribusi. Selain itu, faktor eksternal seperti ketergantungan pada impor dan

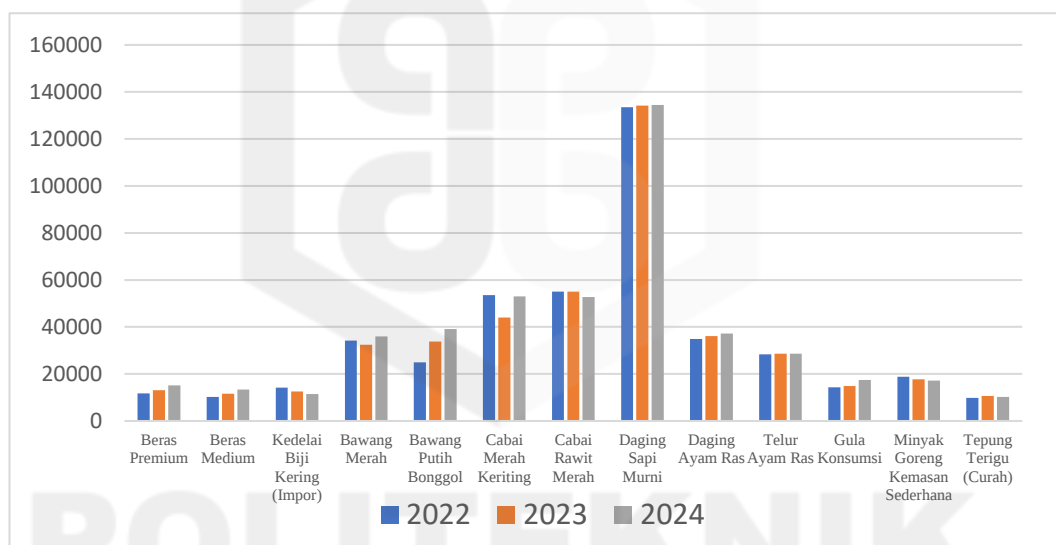
momen musiman seperti hari raya atau peristiwa tertentu juga turut memengaruhi dinamika harga pangan (Hendriana, 2022). Dampaknya, tekanan harga ini tidak hanya memperberat beban ekonomi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan inflasi yang berisiko mengganggu kestabilan perekonomian secara keseluruhan.

Karakteristik inflasi pangan di Indonesia yang sangat rentan terhadap berbagai kejutan (shock) dari sisi penawaran memerlukan perhatian khusus dalam penyusunan kebijakan makroekonomi. Kejutan penawaran, seperti gangguan pada rantai distribusi, fluktuasi harga komoditas internasional, dan kondisi cuaca yang ekstrem, sering kali memicu volatilitas harga pangan di pasar domestik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan makroekonomi yang terintegrasi dan holistik, yang dirancang melalui koordinasi dan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Bank Indonesia. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan stabilitas harga pangan dan mengurangi dampak inflasi pada masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan.

Salah satu instrumen kebijakan yang diimplementasikan untuk memantau dan mengendalikan inflasi, terutama di tingkat daerah, adalah pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). TPID berperan sebagai forum koordinasi antarlembaga yang bertugas untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi langkah-langkah pengendalian inflasi di setiap daerah. Keberadaan TPID ini sangat penting dalam menghadapi dinamika inflasi yang bersifat lokal maupun nasional, terutama terkait harga pangan yang sering kali bervariasi antarwilayah. Dalam konteks penelitian ini, analisis peran TPID menjadi relevan untuk memahami sejauh mana efektivitas kebijakan dapat membantu pengendalian harga pangan di Indonesia. Selain itu, kajian mengenai sinergi antara kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia melalui TPID dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai strategi optimal dalam menanggulangi dampak inflasi pangan yang dipicu oleh kejutan penawaran. TPID dimulai pada tahun 2008 setelah terbentuknya Tim Pengendalian Inflasi yang dikenal dengan TPI pada tahun 2005. Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2017, tentang Tim Pengendalian Infasi Nasional, TPID mempunyai tugas diantaranya yaitu mengumpulkan data harga barang dan jasa penting, penyusunan kebijakan daerah untuk mengendalikan inflasi dengan mengacu pada kebijakan inflasi nasional, penguatan sistem logistik dan program lain yang mampu menurunkan inflasi.

Fluktuasi harga pangan tidak hanya merugikan konsumen saat harga naik, tetapi juga merugikan produsen dan pedagang saat harga turun. Oleh karena itu,

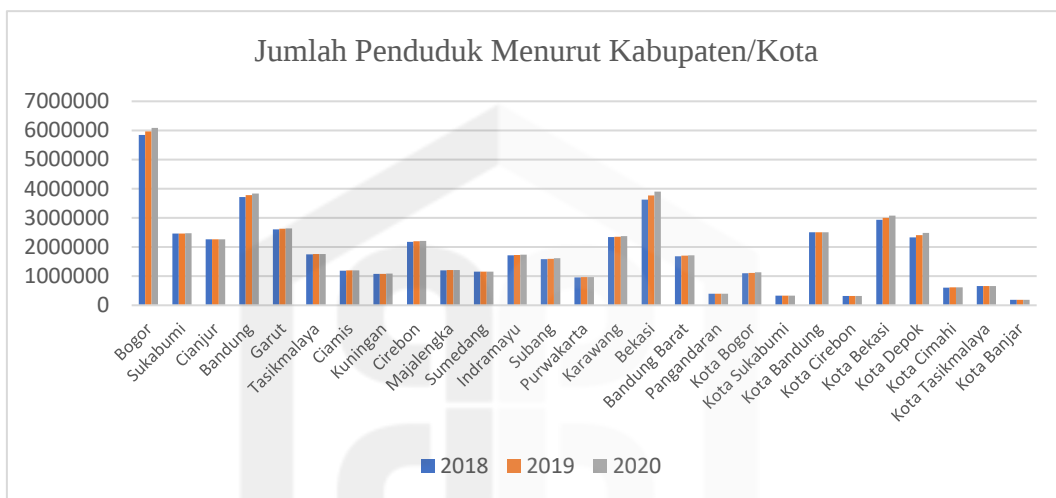


Sumber: Badan Pangan Nasional, data diolah, 2024

Gambar 1.6.
Harga rata-rata komoditas pangan di Jawa Barat 2022-2024

Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional, terjadi peningkatan signifikan pada rata-rata harga komoditas pangan di Provinsi Jawa Barat selama periode 2022 hingga 2024. Sebagai ilustrasi, harga bawang putih mengalami lonjakan signifikan, dari Rp 25.000 per kilogram pada tahun 2022 menjadi Rp 39.000 per kilogram pada tahun 2024. Kenaikan serupa juga terlihat pada harga beras premium dan beras medium, yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu penyebab utama dari meningkatnya harga beras adalah penurunan produksi beras nasional. Penurunan ini sebagian besar dipicu oleh alih fungsi lahan sawah secara besar-besaran yang masih terus berlangsung.

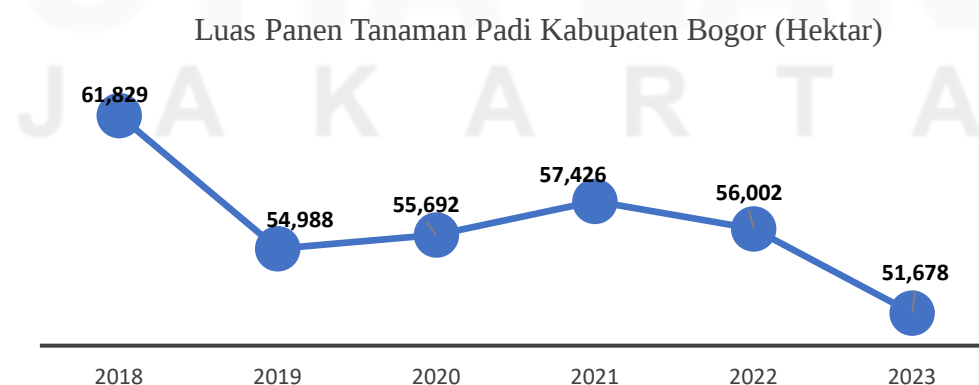
Persoalan inflasi pangan menjadi perhatian nasional yang krusial, terutama di tengah pertumbuhan penduduk yang cepat dan tantangan urbanisasi yang kian



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah, 2020

Gambar 1.7.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Jawa Barat 2018-2020

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bogor setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini mendorong lonjakan permintaan terhadap komoditas pangan. Urbanisasi yang pesat di wilayah ini telah menyebabkan perubahan signifikan dalam tata guna lahan, dengan banyak lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi area pemukiman dan infrastruktur.



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah, 2024

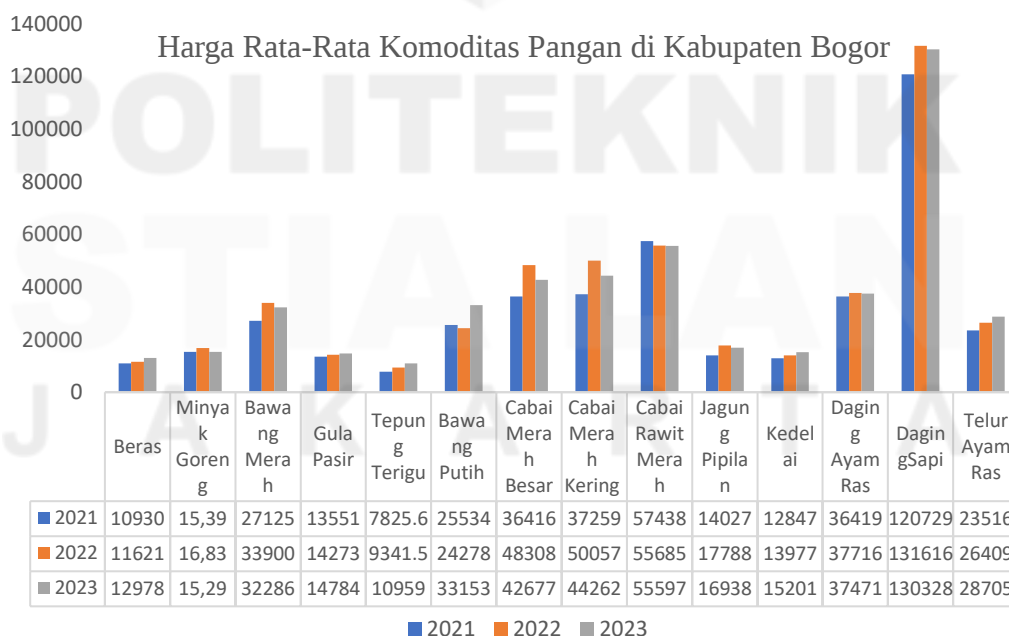
Gambar 1.8.
Luas Panen Tanaman Padi Kabupaten Bogor 2018-2023

Pada tahun 2018, luas panen padi masih relatif tinggi. Luas tersebut menurun dan terus mengalami fluktuasi hingga mencapai titik terendah pada tahun 2023. Selain penurunan produksi padi, penurunan luas lahan pertanian yang terjadi juga berdampak pada produksi komoditas palawija.

Tabel 1.1.
Produksi Komoditas Pangan Kabupaten Bogor Tahun 2019-2022

No	Komoditas	Produksi (Ton)			
		2019	2020	2021	2022
1	Padi	509.119	477.255	502.363	484.957
2	Palawija	150.076	144.424	149.339	126.289
3	Sayuran	115.193	112.493	112.721	126.676
4	Buah-buahan	123.135	106.555	88.948	95.949
5	Tanaman Obat	10.447	9.539	14.999	16.479
TOTAL		915.588	858.868	877.313	857.242

Sumber : Buku Monografi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, 2023



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, data diolah, 2023

Gambar 1.9.
Harga rata-rata komoditas pangan di Kabupaten Bogor 2021-2023

Dengan berkurangnya produksi komoditas pangan tersebut, sementara permintaan pangan terus meningkat akibat pertumbuhan populasi, pasokan terbatas menyebabkan harga-harga pangan terus naik. Dampaknya, harga pangan menunjukkan fluktuasi yang signifikan pada beberapa komoditas seperti beras, cabai, gula pasir, daging ayam ras, dan komoditas pangan lainnya. Fluktuasi harga pangan di Kabupaten Bogor yang terjadi tidak hanya membebani masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, tetapi juga mencerminkan ketidakefektifan pengendalian harga yang ada. Kenaikan harga yang sulit dikendalikan adalah kelemahan dalam mekanisme pengendalian harga, baik dari segi kebijakan pemerintah maupun efisiensi distribusi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara pengendalian harga pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor serta mengevaluasi efektivitas program pengendalian harga pangan yang diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk menjaga stabilitas harga pangan di masa mendatang.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dengan cara yang merata dan menyeluruh. Salah satu peran penting pemerintah adalah stabilitas ekonomi, yang juga dikenal sebagai regulasi. Dalam kapasitas ini, pemerintah berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan ekonomi negara. Undang-Undang No 3 Tahun 2004 Pasal 7 menetapkan bahwa salah satu tugas utama Bank Indonesia adalah mencapai dan menjaga kestabilan rupiah. Hal ini merupakan mencakup stabilitas nilai rupiah terhadap barang dan jasa, yang tercermin dalam pengendalian inflasi.

Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kabupaten Bogor merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah daerah sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas harga, khususnya harga pangan. Sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota, Kabupaten Bogor memegang peranan penting dalam menjamin kelancaran rantai pasokan pangan, tidak hanya untuk wilayahnya sendiri, tetapi juga untuk kawasan Jabodetabek dan sekitarnya. Tingginya tekanan permintaan serta dinamika distribusi antarwilayah

menuntut adanya koordinasi yang solid dan responsif antarsektor, guna mencegah terjadinya lonjakan harga yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.

Pembentukan TPID Kabupaten Bogor sejalan dengan kebijakan nasional dalam pengendalian inflasi yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. TPID bertugas memantau perkembangan harga, menganalisis potensi gangguan pasokan dan distribusi, serta menyusun langkah-langkah intervensi yang tepat seperti pelaksanaan operasi pasar, gelar pangan murah, dan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah. Melalui tim ini, Kabupaten Bogor dapat lebih adaptif dalam menghadapi tantangan inflasi, termasuk yang dipicu oleh faktor musiman, gejolak cuaca, maupun dinamika harga di pasar global. Dengan pendekatan yang terintegrasi, TPID menjadi instrumen vital dalam menciptakan kestabilan harga dan menjamin ketersediaan pangan daerah.

Peran TPID Kabupaten Bogor sangat penting dalam memastikan bahwa harga pangan tetap terkendali, terutama mengingat tingginya sensitivitas wilayah ini terhadap perubahan harga komoditas utama seperti beras, cabai, dan sayuran. Melalui pengumpulan data harga secara berkala, TPID dapat memetakan potensi kenaikan harga dan mengambil langkah preventif untuk mengatasi gangguan pasokan. Selain itu, TPID juga berperan dalam merumuskan kebijakan lokal yang sesuai dengan karakteristik ekonomi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan strategi pengendalian inflasi nasional. Dengan mengoptimalkan sistem logistik dan memperkuat kolaborasi antar-stakeholder, TPID Kabupaten Bogor berupaya untuk menjaga kestabilan harga pangan, sehingga dapat melindungi daya beli masyarakat dan menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Bogor. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kabupaten Bogor di sah kan melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 500/294/KPTS/Per-UU/2021 Tanggal 18 Mei 2021 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

Hubungan antara administrasi publik dan harga pangan sangat penting dalam memastikan kestabilan harga pangan di masyarakat, karena administrasi publik berperan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan yang

mempengaruhi sektor pangan. Berdasarkan penelitian yang ada, administrasi publik bertanggung jawab dalam perencanaan kebijakan harga pangan yang dapat mengatur distribusi pangan, pengendalian inflasi, serta menjaga ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau. Sebagai contoh, penelitian oleh Kamaruddin dan Hamizar (2021) menunjukkan bahwa administrasi publik memainkan peran kunci dalam menetapkan kebijakan harga pangan yang dapat mengatasi ketahanan pangan dan mencegah lonjakan harga yang merugikan masyarakat. Selain itu, penelitian Rahman dan Wahyuni (2017) mengungkapkan pentingnya pengelolaan sistem informasi harga pangan real-time, yang dikelola oleh pemerintah, untuk memberikan dasar yang lebih kuat bagi pengambilan keputusan terkait pengendalian harga pangan. Dalam konteks ini, administrasi publik harus mengoordinasikan berbagai lembaga terkait, mengawasi implementasi kebijakan, serta melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat menanggulangi inflasi pangan dan menjaga stabilitas harga pangan di pasar.

Kondisi pengendalian harga pangan menarik untuk diteliti karena harga pangan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti rumah tangga miskin. Ketidakstabilan harga pangan dapat memicu inflasi yang tinggi, yang pada gilirannya berpotensi mengganggu ketahanan pangan dan memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi. Selain itu, pengendalian harga pangan merupakan tantangan kompleks yang melibatkan berbagai faktor, mulai dari kebijakan pemerintah, distribusi yang efisien, hingga fluktuasi biaya produksi. Dalam konteks Kabupaten Bogor, yang memiliki tantangan spesifik terkait distribusi pangan dan pengaruh perubahan harga input pertanian, penelitian ini sangat relevan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pengendalian harga pangan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini juga penting untuk memahami bagaimana administrasi publik dapat berperan dalam menjaga kestabilan harga pangan dan mencegah dampak negatifnya terhadap perekonomian lokal, dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, dan kebijakan perdagangan internasional.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan utama yang dapat diidentifikasi dan dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata pengeluaran per kapita nasional untuk pangan yang tinggi belum diimbangi dengan efektivitas kebijakan pengendalian harga, sehingga masyarakat tetap rentan terhadap gejolak harga.
2. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat di Kabupaten Bogor belum diikuti dengan peningkatan kapasitas produksi dan distribusi pangan yang memadai, sehingga menimbulkan tekanan pada ketersediaan pangan.
3. Penurunan luas panen padi secara signifikan dari tahun ke tahun menunjukkan lemahnya upaya perlindungan lahan pertanian dan keberlanjutan produksi pangan lokal di Kabupaten Bogor.
4. Fluktuasi harga pangan seperti beras, bawang putih, dan gula dari 2021 hingga 2023 menunjukkan tidak stabilnya pasar pangan dan lemahnya kontrol terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi harga.
5. Ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan pangan belum diatasi secara sistematis, yang mengindikasikan kurang optimalnya tata kelola produksi dan distribusi pangan.
6. Ketidakmampuan dalam mengendalikan fluktuasi harga mencerminkan lemahnya mekanisme kebijakan harga dan inefisiensi dalam sistem distribusi pangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

1. Mengapa pengendalian harga pangan yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Bogor belum efektif?
2. Bagaimana strategi pengendalian harga pangan yang akan diterapkan di Kabupaten Bogor?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi ketidakefektifan pengendalian harga pangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.
2. Menganalisis strategi pengendalian harga pangan yang akan diterapkan di Kabupaten Bogor.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis: Menambah pengetahuan mengenai pengendalian harga pangan, khususnya Kabupaten Bogor, serta memberikan kontribusi pada literatur akademik mengenai kebijakan pangan.
2. Manfaat Praktis: Memberikan informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dan pemerintah daerah dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengendalikan harga pangan di Kabupaten Bogor.
3. Manfaat Sosial: Membantu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dengan menyediakan rekomendasi strategi yang dapat memastikan harga pangan tetap terjangkau dan stabil.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor penyebab ketidakefektifan pengendalian harga pangan di Kabupaten Bogor, maka kesimpulan disusun guna merumuskan pokok-pokok permasalahan secara ringkas dan sistematis.

1. Ketidakefektifan pengendalian harga pangan di Kabupaten Bogor disebabkan oleh kombinasi tekanan dari sisi permintaan dan biaya, serta kelemahan struktural dalam kebijakan dan pelaksanaannya. Dari sisi permintaan (*demand-pull inflation*), pertumbuhan penduduk dan peningkatan daya beli tidak diimbangi dengan pasokan lokal yang memadai, sehingga ketergantungan pada pasokan eksternal membuat harga pangan rentan terhadap fluktuasi. Dari sisi biaya (*cost-push inflation*), distribusi yang panjang, infrastruktur yang belum optimal, dan lemahnya kelembagaan menambah biaya dan menghambat efisiensi. Efektivitas strategi 4K (keterjangkauan, ketersediaan, kelancaran distribusi, dan komunikasi) telah menunjukkan dampak positif, namun belum sepenuhnya terintegrasi dan masih bersifat reaktif. Ketiadaan pasar induk, lemahnya regulasi dan penegakan hukum, serta kurangnya koordinasi lintas sektor turut memperburuk efektivitas pengendalian. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh yang mencakup penguatan produksi lokal, perbaikan distribusi, serta integrasi data dan kebijakan lintas instansi untuk mewujudkan sistem pengendalian harga pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
2. Strategi holistik pengendalian harga pangan di Kabupaten Bogor dirumuskan sebagai respons atas ketidakefektifan pendekatan sektoral yang selama ini belum mampu mengatasi tekanan inflasi dari sisi permintaan maupun biaya secara menyeluruh. Melalui enam pilar utama, (penguatan produksi lokal, reformasi distribusi, digitalisasi data dan komunikasi, penguatan

kelembagaan dan hukum, pembangunan infrastruktur logistik, serta kebijakan yang terintegrasi dan partisipatif) strategi ini menawarkan solusi sistemik yang menjangkau akar permasalahan dari hulu ke hilir. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menstabilkan harga dalam jangka pendek, tetapi juga membangun ketahanan sistem pangan daerah yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Dengan pelibatan aktif berbagai pemangku kepentingan dan integrasi lintas sektor, strategi ini menjadi jawaban implementatif dan adaptif atas tantangan pengendalian harga pangan di Kabupaten Bogor.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai Strategi Pengendalian Harga Pangan Kabupaten Bogor, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor disarankan untuk membangun Pasar Induk sebagai pusat distribusi utama guna mempersingkat rantai pasok dan menurunkan biaya logistik pangan. Infrastruktur ini harus didukung oleh sistem logistik modern yang terintegrasi dengan fasilitas cold storage agar distribusi tetap efisien dan kualitas pangan terjaga. Selain itu, reformasi data pangan berbasis spasial-digital perlu diterapkan agar kebijakan dapat didasarkan pada informasi kebutuhan, stok, dan distribusi pangan secara real-time dan akurat. Pemda juga perlu mendorong investasi jangka panjang dalam infrastruktur pertanian seperti irigasi tetes dan embung desa yang adaptif terhadap iklim, serta memberikan insentif pajak kepada desa-desa yang menjaga keberlanjutan lahan sawah produktif sebagai bentuk komitmen terhadap ketahanan pangan daerah.
2. Dinas teknis (DKP, Disdagin, Distanhobun) di Kabupaten Bogor memiliki peran strategis dalam stabilisasi harga dan pasokan pangan, antara lain dengan mengembangkan kemitraan antara petani dan BUMD pangan sebagai off-taker yang menetapkan harga dasar agar petani terlindungi dari fluktuasi harga pasar. Upaya ini perlu dilengkapi dengan sistem transportasi pangan antar-wilayah

berbasis zonasi, seperti optimalisasi jalur distribusi hortikultura dari Sub Wilayah Pengembangan (WP) Jonggol ke WP Tengah. Intervensi harga juga harus diperluas ke tingkat hulu dan distributor melalui pengawasan yang lebih ketat dan sistem transparansi harga digital. Dengan demikian, distribusi pangan dapat dikendalikan secara lebih adil dan efisien, serta mempersempit ruang gerak spekulasi pasar.

3. Pelaku usaha di sektor pangan, termasuk petani, distributor, dan pedagang, adalah untuk meningkatkan kolaborasi dan integrasi dengan kluster agribisnis digital yang dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi serta memperluas akses pasar. Pelaku usaha juga disarankan untuk memanfaatkan teknologi dalam pemasaran digital dan e-commerce guna menjangkau konsumen yang lebih luas dan meningkatkan daya saing di pasar. Selain itu, pembentukan asosiasi pedagang lokal berbasis komunitas dapat memperkuat kontrol terhadap distribusi pangan dan mengurangi ketergantungan pada tekanan harga dari luar daerah. Pelaku usaha juga perlu aktif dalam mengikuti perkembangan teknologi agritech untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Terakhir, pelaku usaha dapat mengoptimalkan pemanfaatan gudang desa berbasis koperasi untuk memperbaiki sistem distribusi pangan lokal, sehingga dapat lebih efisien dan terjangkau.
4. Kalangan akademisi dan lembaga riset seperti IPB diharapkan berperan aktif dalam menyusun kebijakan berbasis bukti melalui audit berkala atas daya dukung lingkungan pangan per kecamatan dan komoditas, guna mengidentifikasi wilayah strategis yang perlu dilindungi dari alih fungsi lahan. Selain itu, mereka dapat merancang pendekatan tata ruang berbasis pangan untuk memastikan bahwa pembangunan wilayah tetap mempertahankan fungsi kawasan pertanian. Upaya ini perlu dilengkapi dengan pengembangan indeks kerentanan pangan lokal yang tidak hanya mengandalkan data konsumsi beras, tetapi juga menggabungkan indikator demografi, iklim, dan infrastruktur, agar strategi intervensi menjadi lebih kontekstual dan adaptif.

5. Peran masyarakat sipil dan media sangat penting dalam mengawal kebijakan pangan melalui pembentukan Tim Pemantau Harga Komunitas yang bekerja sama dengan Satgas Pangan dan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) untuk melaporkan harga pangan harian secara akurat dari pasar lokal. Selain pengawasan, kampanye konsumsi pangan lokal non-beras perlu digalakkan sebagai strategi diversifikasi konsumsi berbasis kearifan lokal, guna mengurangi ketergantungan terhadap komoditas seperti beras dan cabai. Media sosial dan radio komunitas juga menjadi sarana edukasi publik yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang rantai pasok pangan dan pentingnya menjaga produksi pangan lokal demi ketahanan pangan yang berkelanjutan.
6. Penelitian selanjutnya disarankan agar fokus diarahkan pada pengembangan model integratif sistem ketahanan pangan daerah berbasis spasial, ekonomi, dan kelembagaan, yang mampu memetakan secara detail interaksi antara daya dukung lahan, distribusi pangan, dan fluktuasi harga di tingkat lokal. Penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan data spesifik Kabupaten Bogor yang selama ini menjadi kendala dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan, serta untuk merumuskan strategi mitigasi inflasi pangan berbasis bukti. Selain itu, kajian mendalam terhadap efektivitas intervensi distribusi dan peran lembaga penyangga seperti BUMD dan koperasi pangan juga perlu dilakukan untuk menjawab tantangan ketimpangan akses pangan dan ketergantungan pasokan luar daerah. Pendekatan partisipatif yang melibatkan petani, distributor, dan konsumen juga direkomendasikan guna menghasilkan model pengendalian harga pangan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In *The Routledge Handbook of International Planning Education*.
<https://doi.org/10.4324/9781315661063-13>
- Ali, H. (2020). Analisis Kelayakan Kenaikan Harga dan Biaya Produksi Usaha Tani Padi selama Pandemi Virus Covid-19 di Wilayah Kecamatan Barat Kabupaten Magetan. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 5(1), 63–74.
<https://doi.org/10.15642/oje.2020.5.1.63-74>
- Badan Ketahanan Pangan. (2022). Strategi Ketahanan Pangan Nasional. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.
- Bahtiar, R., & Raswatie, F. D. (2023). Analisis Fluktuasi Harga Pangan di Kota Bogor. *Indonesian Journal of Agriculture Resource and Environmental Economics*, 1(2), 70–81. <https://doi.org/10.29244/ijaree.v1i2.42020>
- Bank Indonesia. (2020). Laporan Perekonomian Indonesia 2020. Jakarta: Bank Indonesia.
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/Default.aspx>
- Bank Indonesia. (2021). Kajian Inflasi Daerah dan Strategi 4K. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2022). Peran TPID dalam Pengendalian Inflasi Melalui Strategi 4K. Jakarta: Bank Indonesia.
- Blanchard, O., & Johnson, D. R. (2013). *Macroeconomics* (6th ed.). Pearson Education.
- BPS. (2022). *IHK 90 Kota di Indonesia 2021*.
- Dadang Solihin. (2021). *ADMINISTRASI PEMBANGUNAN*. Jakad Media Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=L2oYEAAAQBAJ>
- Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. (2014). *Macroeconomics* (12th ed.). McGraw-Hill Education.
- Gow, J. I. (2018). Public sector innovation theory revisited. *Leading-Edge Research in Public Sector Innovation: Structure, Dynamics, Values and Outcomes*, 19(2), 429–455.
- Gufran, Ghany, N. F., Wahyuli, S., & Irfadat, T. (2022). *Dinamika Administrasi Pembangunan*. MEGA PRESS NUSANTARA.
<https://books.google.co.id/books?id=-4HeEAAAQBAJ>
- Kamaruddin, & Hamizar. (2021). Manajemen Penetapan Harga Terhadap Ketahanan Pangan. *Jurnal Amal*, 5(1), 23-34. Retrieved from jurnal.iainambon.ac.id
- Hanly Fendy Djohar Siwu. (2020). Strategi Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Strategi Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi*, 1–11.

- Hendriana, Y. (2022). Analisis Volatilitas Harga dan Pola Distribusi Pangan di Jawa Barat. *National Conference West Java Economic Society*, 12–18.
- International Monetary Fund (2023). *World Economic Outlook: Inflation and Policy Trade-Offs*. Washington, D.C.
- Jaya, A., & Mardi Murahman. (2022). Kebijakan Penanganan Dampak Inflasi Pasca Kenaikan Bbm Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Masda*, 1(2), 112–120. <https://doi.org/10.58328/jm.v1i2.87>
- Kementerian Perdagangan RI. (2020). *Strategi Komunikasi dalam Pengendalian Harga dan Ketersediaan Barang*. Jakarta: Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri.
- Mankiw, N. G. (2019). *Principles of Economics* (8th ed.). Cengage Learning.
- Mishkin, F. S. (2015). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets* (10th ed.). Pearson.
- Mubyarto. (1998). *Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: LP3ES.
- Panjaitan, D. T. M. R., & Pardede, D. K. (2021). *Administrasi Publik*. CV.Eureka Media Aksara, 9. <https://repository.penerbiteuraka.com/media/publications/366050-administrasi-publik-d2451b92.pdf>
- Parkin, M. (2016). *Economics* (12th ed.). Pearson.
- Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022. (2022). 1302, 1–6.
- Pradana, R. S. (2019). Kajian Perubahan Dan Volatilitas Harga. *JIEP-Vol. 19, No 2, November 2019 ISSN (P) 1412-2200 E-ISSN 2548-1851*, 19(2).
- Prihadyatama, A., & Kurniawan, H. A. (2022). Studi Literatur Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah di Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(4), 238–264.
- Puspita Widasari, N., Tanur, E., Uli Sitanggang, Y. R., & Situmorang, M. (2023). Pengendalian Harga Pangan Melalui Penghitungan Indikator Proxy Inflasi. *Jurnal Good Governance*, 117–136. <https://doi.org/10.32834/gg.v19i2.625>
- Putra, R., & Hasibuan, A. (2022). Analisis Upaya Pengendalian Inflasi Era Covid-19 di Indonesia. *Journal of Management, Economic and Accounting (JMEA)*, 1(2), 89–95. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jisc>
- Rahman, M. M., & Wahyuni, S. (2017). Desain Sistem Informasi Harga Pangan Real-Time Sebagai Instrumen Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah. *Jurnal Insypro*, 9(2), 120-132. Retrieved from journal.uin-alauddin.ac.id
- Rumaratu, P. I., Mantiri, M., & Stefanus Sampe. (2018). *Pengendalian Harga Beras Di Kota Manado Oleh Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Utara Dan Gorontalo. 1*.
- Saaty, T.L. (1991). *Analytical hierarchy process*. McGraw-Hill, New York.

- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sari, V. M., Utoyo, B., & Tresiana, N. (2021). *Evaluasi Pengendalian Inflasi di Kota Bandar Lampung Tahun 2018*. 3.
- Sayaka, B., & Adhie, S. (2016). Stabilisasi Harga Pangan Nonberas di Malaysia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 34(1), 71. <https://doi.org/10.21082/fae.v34n1.2016.71-86>
- Surya, T. A. (2015). *Pengendalian Inflasi Komoditas Pangan Menjelang Bulan Ramadhan*. VII(11), 13–16. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-VII-11-I-P3DI-Juni-2015-78.pdf
- Yurianto, Y. (2020). Analisis Kebijakan Pengendalian Inflasi Dki Jakarta. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 17(1), 12. <https://doi.org/10.30651/blc.v17i1.4179>
- Yuniwinsah, Fadhliah, Drs. Ali Anis, MS. 2020. Analisis Kausalitas Kebijakan Fiskal Ekspansif, Kebijakan Moneter Ekspansif Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2020, Hal 55-64

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A